

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Efektivitas Aplikasi SIKS-NG dalam Pendataan Kemiskinan di Dinas**

###### **Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan**

Berdasarkan dari hasil dan analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan efektivitas Aplikasi SIKS-NG dalam pendataan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis teori yang digunakan, yaitu :

1. **Pemahaman Program**

Pemahaman program dalam penelitian ini masih menjadi masalah utama. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan data kemiskinan, beberapa masalah telah teridentifikasi. Pertama, banyak operator yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penginputan data DTKS, menyebabkan data yang dihasilkan tidak valid. Kedua, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya verifikasi data, yang mengakibatkan beberapa individu yang tidak layak menerima bantuan sosial masih terdaftar. Ketiga, ketidakhadiran dalam sosialisasi memperburuk situasi, dengan beberapa masyarakat mengajukan bantuan tanpa pemahaman yang memadai.

## 2. Tercapainya Tujuan

Dalam poin pencapaian tujuan program menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya. SIKS-NG bertujuan menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Namun, hasil analisis mengindikasikan adanya masalah signifikan, seperti ketidaksesuaian data, data ganda, dan keterlambatan pemutakhiran yang menghambat efektivitas program. Selain itu, adanya praktik pilih kasih juga mempengaruhi akurasi data dan distribusi bantuan.

## 3. Perubahan Nyata

Program ini telah membawa perubahan nyata dalam mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan data bagi petugas pendataan. Aplikasi ini berhasil meningkatkan akurasi data pada tingkat tertentu, namun masih terdapat kendala dalam hal ketidakpatuhan terhadap pedoman, sehingga data yang diinput sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Meskipun aplikasi ini sudah diterapkan sejak 2019, intensitas penggunaannya baru meningkat pada 2022. Kendala utama adalah kurangnya pelatihan serta keterbatasan sumber daya di desa.

## 4. Ketetapan Sasaran

Program SIKS-NG bertujuan untuk meningkatkan akurasi pendataan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Namun, implementasinya di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menghadapi

tantangan teknis dan sosial. Data yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi riil, menyebabkan bantuan disalurkan kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan. Meski instruksi dari Dinas Sosial dan Surat Edaran Bupati sudah ada, proses verifikasi dan validasi data masih terhambat, terutama di tingkat desa. Aparatur desa cenderung enggan mengubah data penerima manfaat karena kekhawatiran reaksi negatif dari masyarakat.

#### 5. Sosialisasi Program

Sosialisasi program SIKS-NG di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan langkah penting untuk memastikan akurasi data kemiskinan dan partisipasi masyarakat. Meskipun berbagai saluran komunikasi telah digunakan, seperti pelatihan operator, poster, dan media sosial, efektivitasnya masih terbatas. Kendala utama adalah kurangnya konsistensi dalam pembaruan informasi di media sosial dan minimnya distribusi poster di tingkat desa, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur program. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah.

#### 6. Pemantauan Program

Pemantauan pasca-pelatihan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk memastikan data kemiskinan terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi Kecamatan dan Desa untuk memverifikasi data yang diterima dan mengatasi kendala yang ada. Proses ini melibatkan pengecekan data dari operator desa serta interaksi langsung dengan

masyarakat untuk menyesuaikan bantuan sosial yang diberikan. Namun, ada kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan ini, dengan kunjungan rutin yang jarang dilakukan dan sering hanya terjadi pada acara khusus atau kunjungan dari pihak provinsi. Akibatnya, pemantauan program belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kualitas dan ketepatan data serta bantuan sosial yang disalurkan.

### **5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Aplikasi SIKS-NG dalam Pendataan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan**

#### **5.1.2.1 Faktor Pendukung**

1. Dukungan Bimbingan Teknis dan Pelatihan: Pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan bagi operator SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan dengan baik. Kegiatan ini membantu meningkatkan kompetensi para petugas lapangan dalam menggunakan aplikasi SIKS-NG, sehingga mereka mampu melaksanakan pendataan DTKS dengan lebih efektif dan sesuai prosedur yang ditetapkan.
2. Sarana Pendukung bagi Pelaksana Pengelola Data: Fasilitas yang memadai, seperti komputer, akses internet, ruangan kerja, dan perlengkapan lainnya, sangat mendukung kelancaran tugas operator SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Penyediaan sarana ini meningkatkan efisiensi

dan efektivitas kerja, serta berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan program pendataan.

3. Dukungan Masyarakat: Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam proses pendataan DTKS. Masyarakat menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dengan memberikan data yang diperlukan secara sukarela, yang pada gilirannya membantu operator dalam menghasilkan data yang valid dan aktual. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara operator dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam pendataan sosial.

#### **5.1.2.2 Faktor Penghambat**

1. Ketidaksinkronan Data: Terungkap bahwa masih terdapat lebih dari dua ribu data masyarakat di aplikasi SIKS-NG yang perlu diperbaiki dan disinkronkan dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masalah ini meliputi ketidakcocokan NIK, nama, alamat, serta detail lainnya, yang menghambat proses penetapan status sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, data yang tidak sinkron dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menerima bantuan sosial secara tepat. Upaya perbaikan dan sinkronisasi data menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Penggunaan Data Penerima Bantuan Sosial: Banyak desa yang belum melakukan pembaruan data secara berkala, yang menyebabkan data yang

diterima tetap tidak akurat. Masalah ini termasuk ketidakpadanan data antara SIKS-NG, Disdukcapil, dan Dapodik, serta data penerima yang tidak terupdate dengan baik. Kesalahan dalam pencetakan KTP, data yang tidak aktif, dan perubahan status keluarga juga mempengaruhi kelancaran pemberian bantuan sosial.

## **5.2 Rekomendasi**

Aplikasi SIKS-NG untuk pengumpulan data kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan mempermudah petugas dalam proses pendataan melalui verifikasi kelayakan dan menu survei yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat juga dapat memeriksa status pendaftaran mereka dalam DTKS melalui aplikasi ini. Namun, penggunaan aplikasi ini masih belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada. Implementasi program ini memerlukan berbagai masukan, antara lain:

1. Meski sosialisasi telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, penelitian menunjukkan bahwa banyak operator dan masyarakat yang masih tidak mengerti tugas dan kriteria yang diperlukan, menyebabkan data yang tidak valid dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Untuk memperbaiki pemahaman tentang SIKS-NG, disarankan agar Dinas Sosial mengadakan pelatihan rutin bagi operator dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Penggunaan berbagai media komunikasi seperti poster, video,

dan pertemuan langsung dapat membantu menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme umpan balik agar masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan masalah dalam proses pendataan.

2. Program ini telah dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan Dinas Sosial. Namun, ada berbagai kendala seperti data yang tidak sesuai prosedur, data ganda, dan praktik pilih kasih yang menghambat pencapaian tujuan. Untuk meningkatkan efektivitas pendataan kemiskinan dengan SIKS-NG, perlu ada pemilihan operator yang memahami IT, serta pelatihan rutin bagi operator desa tentang prosedur pengumpulan dan verifikasi data. Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk mencegah praktik pilih kasih, dan penerapan mekanisme umpan balik dari masyarakat sangat penting. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembaruan data juga krusial untuk memastikan akurasi informasi, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat.
3. Meskipun aplikasi SIKS-NG mempermudah proses pendataan, tantangan terkait validitas data di lapangan masih menghalangi pencapaian tujuan program. Meskipun terdapat kemudahan administratif, kesesuaian data dengan kondisi nyata belum sepenuhnya terjamin, menciptakan ketidakpastian dalam distribusi bantuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/kota seharusnya mengeluarkan peraturan daerah mengenai program ini, termasuk penetapan pengelola dan honor untuk operator SIKS-NG.

4. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi masih ada ketidaksesuaian antara data yang terdaftar dan kondisi riil penerima manfaat. Disarankan agar pemerintah daerah mengadakan pelatihan intensif bagi operator di tingkat kelurahan dan desa mengenai prosedur verifikasi dan validasi DTKS. Selain itu, diperlukan penanggung jawab di setiap kecamatan/kelurahan untuk melakukan pemantauan yang lebih ketat, memastikan setiap rumah tangga terdaftar memenuhi kriteria sebagai fakir miskin.
5. Meskipun sudah ada upaya seperti bimbingan teknis dan musyawarah desa, masih ada kekurangan dalam penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat. Disarankan agar Dinas Sosial meningkatkan jumlah poster dan informasi di tingkat desa, memperbarui konten media sosial secara berkala, dan mengadakan lebih banyak kegiatan interaktif yang melibatkan masyarakat. Pelatihan untuk aparat desa dan operator juga perlu diperkuat agar mereka dapat menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Setiap kantor desa sebaiknya memiliki akun media sosial yang aktif untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini, dan pemerintah desa harus membuat papan informasi terkait program yang sedang diterapkan.
6. Ada upaya pemantauan yang dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi frekuensi dan konsistensinya masih menjadi kendala. Beberapa informan menyatakan bahwa pemantauan sering kali terbatas pada acara tertentu, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi

masyarakat. Disarankan agar Dinas Sosial melakukan pemantauan rutin dan terjadwal ke tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan perlu ditingkatkan agar kendala yang dihadapi dapat teridentifikasi dan diatasi dengan cepat. Dengan cara ini, validitas data dapat terjaga dan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.